

Daftar Pustaka

BUKU

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Joeniarto. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Bandung: Alumni, 1992.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi Dan Demokrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Moenta, Andi Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1978.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharizal, Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Susanti, Martien Herna. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Triwulan, Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Widodo, Ibnu Sam dkk. *Hukum Tata Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Wijaya, Hengki, and Helaludin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

JURNAL

- Andin, Afifah, Dina Risti, Isnaini Latifah, Maya Panuntun, Mutia Nur, Ratna Selviani, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis." *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2024): 370–83. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4684>.
- Diamantina, Amalia. "Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 1 (2010): 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.39.1.2010.36-43>.
- Gemilang Dwi Anandika, Henny Juliani, and Amiek Soemarmi. "Upaya Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sektor Perikanan." *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012): 1–7. <https://doi.org/10.14710/dlj.2012.1024>
- Putra, Ganda Surya Satya Johni Arifin. "Membangun Politik Hukum Pemilu Yang Demokratis Dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014): 197–203. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.197-203>.
- Virlana, Bintari, and Arman Tjoneng. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 57–58. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>.
- Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–99. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.

Yusdheaputra, Wafa. “Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191-214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>

TESIS

Umar, Khairul. “Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.” Tesis, Universitas Wiraraja, 2025. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/5310>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, Dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 400.3/070.1/2025 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Tegal

BUKU DOKUMEN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. 2025. *Panduan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

BERITA DAN MEDIA ONLINE

Antara Jatim. 2025. Kemenkes percepat proses penerbitan SLHS. URL: <https://jatim.antaranews.com/berita/981913/kemenkes-percepat-proses-penerbitan-slhs>

Badan Gizi Nasional. 2025. BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap. URL: <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>

Badan Gizi Nasional. 2026. BGN Luncurkan Aplikasi “Reviu MBG” untuk Perkuat Pengawasan Kualitas Makanan Secara Real-Time. URL: <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-luncurkan-aplikasi-reviu-mbg-untuk-perkuat-pengawasan-kualitas-makanan-secara-real-time>

Badan Gizi Nasional. 2026. BGN Tegas Bakal Stop Operasional SPPG Bila Tak Memiliki SLHS dan IPAL. URL: <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tegas-bakal-stop-operasional-sppg-bila-tak-miliki-slhs-dan-ipal>

Badan Gizi Nasional. 2025. Pemerintah Telah Siapkan Alur Seleksi PPPK untuk SPPI Batch III. URL: <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/pemerintah-telah-siapkan-alur-seleksi-pppk-untuk-sppi-batch-iii>

- Badan Gizi Nasional. 2025. Pentingnya Program MBG: Tingkatkan SDM dan Pencegahan Stunting. URL: <https://www.bgn.go.id/news/artikel/pentingnya-program-mbg-tingkatkan-sdm-dan-pencegahan-stunting>
- Badan Gizi Nasional. 2025. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siap Operasional 17 Maret 2025. URL: <https://www.bgn.go.id/sppg-march-deleted/>
- Badan Pusat Statistik Kota Tegal. 2025. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kota Tegal, 2026. URL: <https://tegalkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-tegal--2023.html?year=2026>
- Badan Pusat Statistik Kota Tegal. 2016. Keadaan Geografi Kota Tegal. URL: <https://tegalkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzkjMQ==/keadaan-geografi-kota-tegal.html>
- Diskominfo Indramayu. 2023. Dirjen Bangda: Perencanaan Pembangunan Agar Sesuai Norma Yang Berlaku. URL: <https://indramayukab.go.id/dirjen-bangda-perencanaan-pembangunan-agar-sesuai-norma-yang-berlaku/>
- Hanifah Dwi Jayanti. 2025. Menanti Janji Pemerintah untuk Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-janji-pemerintah-untuk-segera-terbitkan-perpres-tata-kelola-mbg>
- Humas Jateng. 2026. Dongkrak Penyerapan Produksi Telur, Wagub Minta SPPG Belanja dari Peternak Lokal. URL: https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11335
- Rio Christiawan. 2023. Implementasi Penelitian Hukum Normatif. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2>